

LAPORAN THESIS

**KEHAMILAN TIDAK DIKEHENDAKI (KTD) DALAM
PERKAWINAN: TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
KESETARAAN GENDER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGUNAAN KONTRASEPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**



YACOB A YU PUTRI RIYANTINA

NIM 23.C2.0062

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

LAPORAN THESIS

**KEHAMILAN TIDAK DIKEHENDAKI (KTD) DALAM
PERKAWINAN: TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
KESETARAAN GENDER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGUNAAN KONTRASEPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum Kesehatan



YACOBA AYU PUTRI RIYANTINA

NIM 23.C2.0062

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Kehamilan tidak dikehendaki (KTD) dapat terjadi dalam ikatan perkawinan pada perempuan yang dilarang ber-KB oleh suaminya. Secara *das Sollen* pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah membuat kebijakan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia namun dalam *das Sein* di Kota Semarang pada tahun 2023 masih terdapat 69 kasus pelanggaran hak reproduksi istri oleh suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah, sejauhmana dan bagaimana langkah mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak dikehendaki dalam perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mencari data sekunder dan studi lapangan untuk mencari data primer melalui wawancara terhadap 14 responden di Kota Semarang. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan telah dibuat oleh pemerintah namun dalam implementasi masih belum dapat mewujudkan kesetaraan gender karena tidak disertai dengan ketentuan kebijakan/ *beleidsregel*. 2) Secara umum kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi berpengaruh secara positif terhadap KTD dalam perkawinan karena sebagian besar suami tidak melarang ber-KB dan menyerahkan keputusan KB pada istri setelah kelahiran anak terakhir. 3) Langkah mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi untuk mencegah KTD dalam perkawinan dilakukan melalui perbaikan komunikasi interpersonal PKB/ PLKB dalam melakukan sosialisasi dan KIE kepada *unmet need*, mengadopsi dan menyebarluaskan sosialisasi dan edukasi oleh dokter kandungan dan kebidanan mengenai Program KB semenjak pemeriksaan ANC, dan menghapuskan persetujuan tindakan medis oleh suami pada *informed consent* untuk metode KB implant dan IUD.

Kata Kunci : Kehamilan tidak dikehendaki, kesetaraan gender, kontrasepsi

ABSTRACT

Unwanted pregnancy can occur within a marriage where the wife is prohibited from using contraception by her husband. In principle (das Sollen), the government, as the duty bearer, has established policies to protect, to respect, and to fulfill gender equality as part of human rights. However, in practice (das Sein) in Semarang, by 2023 there are 69 cases of reproductive rights violations by husbands against their wives.

This research aims to understand the government policy, the extent, and the steps taken to achieve gender equality in decision-making regarding the use of contraceptives to prevent unwanted pregnancies within marriage. The research approach used in this study is the sociological juridical method, with data collection conducted through literature study to obtain secondary data and field study to obtain primary data through interviews with 14 respondents in Semarang. The analytical method in this research is qualitative.

The research results show that 1)Government policies in the form of legislation have been enacted, but their implementation has yet to achieve gender equality because they are not followed by policy guidelines/ beleidsregel. 2)In general, gender equality in decision-making on contraceptive use positively affects unwanted pregnancies within marriage because most husbands do not prohibit the use of contraception and leave the decision to use contraception to their wives after the birth of the last child. 3)Steps to achieve gender equality in decision-making on contraceptive use to prevent unwanted pregnancies within marriage include improving interpersonal communication by PKB/PLKB in conducting socialization and information, education, and communication to unmet needs, adopting and disseminating socialization and education by obstetricians and gynecologists regarding Family Planning Program since the ANC examination, and eliminating the requirement for husband's consent on informed consent for implant and IUD.

Keywords : *Unwanted pregnancies, gender equality, contraception*